

---

**PENGARUH DIASPORA ARAB HADHRAMI DALAM PEMBENTUKAN POLITIK  
IDENTITAS BERBASIS AGAMA (STUDI KASUS PEMILIHAN GUBERNUR  
JAKARTA PERIODE 2017-2022)**

**Abdullah<sup>a</sup>**

<sup>a</sup> Hubungan Internasional, Universitas Brawijaya, Malang, Indonesia  
E-mail: a.assegaf@ub.ac.id

---

**ABSTRAK**

Tulisan ini membahas pengaruh diaspora Arab Hadhrami dalam politik identitas di Indonesia, terutama dalam konteks Pilkada Jakarta dari tahun 2017 hingga 2022. Diaspora Arab Hadhrami telah aktif terlibat dalam politik Indonesia, mendukung kemerdekaan negara dan menduduki posisi strategis dalam pemerintahan. Namun, setelah era reformasi, terdapat kecenderungan di kalangan diaspora Arab Hadhrami untuk menggunakan politik identitas berbasis agama. Hal ini telah menyebabkan munculnya politik identitas etnis dan agama dalam Pilkada Jakarta. Penelitian ini bertujuan untuk mengeksplorasi pengaruh diaspora Arab Hadhrami dalam politik identitas dalam Pilkada Jakarta. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif, dengan fokus pada keberadaan diaspora Arab Hadhrami dan hubungannya dengan perkembangan politik identitas selama Pilkada Jakarta. Proses pengumpulan data meliputi tinjauan literatur, analisis dokumen, dan korespondensi dengan pusat penelitian terkait diaspora Arab Hadhrami. Diskusi dalam tulisan ini menyoroti peran diaspora Arab Hadhrami sebelum era reformasi, terutama dalam perdagangan dan kegiatan keagamaan. Kedatangan diaspora Arab Hadhrami di Indonesia telah memiliki dampak signifikan dalam penyebaran Islam dan lanskap politik di wilayah tersebut. Banyak keturunan Arab Hadhrami yang telah menduduki posisi kekuasaan dan mendukung gerakan kemerdekaan Indonesia. Abad ke-20 menjadi periode penting bagi diaspora Arab Hadhrami, dengan perubahan penting dan arah baru dalam komunitas mereka.

**Kata Kunci:** *Diaspora, Hadhrami, Politik Identitas, Pilkada Jakarta, Agama*

***THE INFLUENCE OF THE HADHRAMI ARAB DIASPORA IN POLITICAL FORMATION  
RELIGION-BASED IDENTITY (CASE STUDY OF GOVERNOR ELECTION  
JAKARTA PERIOD 2017-2022)***

**ABSTRACT**

This article discusses the influence of the Hadhrami Arab diaspora on identity politics in Indonesia, particularly in the context of the Jakarta Regional Elections (Pilkada) from 2017 to 2022. The Hadhrami Arab diaspora has been actively involved in Indonesian politics, supporting the country's independence and holding strategic positions in the government. However, after the reform era, there has been a tendency among the Hadhrami Arab diaspora to engage in identity politics based on religion. This has led to the emergence of ethnic and religious identity politics in the Jakarta Regional Elections. This research aims to explore the influence of the Hadhrami Arab diaspora on identity politics in the Jakarta Regional Elections. The research method used is descriptive research, focusing on the presence of the Hadhrami Arab diaspora and its relationship with the development of identity politics during the Jakarta Regional Elections. Data collection processes include literature review, document analysis, and correspondence with relevant research centers on the Hadhrami Arab diaspora. The discussion in this article highlights the role of the Hadhrami Arab diaspora before the reform era, particularly in trade and religious activities. The arrival of the Hadhrami Arab diaspora in Indonesia has had a significant impact on the spread of Islam and the political landscape in the region. Many descendants of the Hadhrami Arab diaspora have held positions of power and supported the independence movement in Indonesia. The 20th century was an important period for the Hadhrami Arab diaspora, with significant changes and new directions within their community.

**Kata Kunci :** *Diaspora, Hadhrami, Politik Identitas, Pilkada Jakarta, Agama*

---

## PENDAHULUAN

Artikel ini akan membahas tentang pengaruh diaspora Arab Hadhrami dalam pembentukan politik identitas berbasis agama (studi kasus pemilihan Gubernur Jakarta periode 2017-2022). Masyarakat keturunan Arab Hadhrami telah melakukan diaspora pada Abad ke-8 sampai ke-9 Masehi. Diaspora merujuk kepada komunitas dengan budaya beebeda yang berada di tengah masyarakat lain yang lebih banyak jumlahnya dengan budaya yang berbeda (Lingua Franca Community, 2020). Faktor yang menyebabkan para keturunan Arab melakukan diaspora secara besar-besaran adalah karena pada saat itu mereka menjadi ancaman bagi kekuatan politik Kekhalifahan Umayyah, banyak golongan Sayyid yang dibunuh bahkan melakukan pengejaran hingga ke wilayah bagian Selatan Arab (Yaman). Selama perjalanan sejarah Indonesia, Diaspora Arab Hadhrami sangat berpartisipasi aktif dalam setiap kehidupan perpolitikan di tanah air. Hal tersebut terlihat dari dukungan terhadap kemerdekaan Indonesia hingga aktif membentuk lembaga-lembaga sosial yang bertujuan untuk mencapai terwujudnya masyarakat yang terdidik.

Selain itu, pada masa awal kemerdekaan, para keturunan Arab Hadhrami ini terlibat aktif di dalam perumusan kemerdekaan Republik Indonesia hingga banyak dari keturunan Arab Hadhrami yang menjabat posisi strategis di pemerintahan. Misalnya A.R Baswedan sebagai menteri penerangan dalam kabinet Soekarno, Ali Alatas sebagai menteri luar negeri pada masa presiden Soeharto, dan kakak beradik Alwi dan Quraisy Shihab yang menjadi menteri pada era Gus Dur. Selain itu, terdapat banyak peran aktif keturunan Arab Hadhrami di bidang sosial budaya seperti Penyanyi Religi Haddad Alwi, Presenter Najwa Shihab, Pejuang Hak Asasi Manusia Munir Thalib, dan lain sebagainya. Masyarakat Keturunan

Arab Hadhrami juga membentuk lembaga pendidikan atau madrasah yang kesemuanya bermarga *sayyid* baik tokoh maupun peranakan (Samudra Eka Cipta, 2020:176).

Hal ini terlihat dari keterlibatan Diaspora Arab Hadhrami dalam pemerintahan, dan juga minornya suara miring terhadap Diaspora Arab Hadhrami. Politik identitas sangat berkaitan erat dengan usaha memperjuangkan hak-hak dan pengakuan terhadap keberadaan kelompok-kelompok minoritas (Fitri Harahap, 2014:521). Namun pasca reformasi yang ditandai dengan era demokrasi liberal, terdapat kecenderungan dari sebagian Diaspora Arab Hadhrami yang menggunakan politik identitas berbasis agama. Hal tersebut terlihat dengan munculnya nama-nama keturunan Arab Hadhrami dalam setiap aktifitas sosial dan perpolitikan yang mendasarkan agama sebagai pijakannya. Momen tersebut menjadi momentum yang hangat karena di mana terdapat keyakinan di benak para kandidat dan tim sukses bahwa cara termudah dan paling efektif untuk menarik hati orang untuk memilih seorang kandidat adalah dengan cara membangkitkan ikatan emosional pemilih pada calon.

Ikatan emosional tersebut selanjutnya akan memunculkan gerakan pembentukan Politik Identitas Etnis dan Agama di DKI Jakarta yang muncul dengan adanya pendekatan kondisional. Oleh karena itu, disinilah penulis melihat perlunya eksplorasi sumber-sumber mobilisasi yang menurut penulis banyak dimainkan perannya oleh para Diaspora Arab Hadhrami seperti FPI yang dipimpin oleh Rizieq Shihab dan banyak majelis-majelis pengajian maupun organisasi keagamaan yang diketuai oleh Peranakan Arab Hadhrami yang secara langsung berpartisipasi dalam riuhnya Politik Identitas Berbasis Agama dalam Pemilihan Gubernur Jakarta 2017 (Sahalatua, 2018).

Berdasarkan latar belakang yang telah disusun di atas, muncul rumusan masalah

yang akan dibahas dalam penelitian kali ini yakni Bagaimana Keberadaan Diaspora Arab Hadhrami mempengaruhi Politik Identitas dalam Kontestasi Pemilihan Gubernur DKI Jakarta Periode 2017-2022. Beberapa kalangan menyimpulkan bahwa politik identitas telah berhasil digunakan sebagai alat untuk memenangkan Pemilu apabila identitas antara pasangan calon satu dan lainnya terapat perbedaan yang cukup signifikan (Dina, 2019:13). Penelitian tentang orang Hadhrami di Indonesia telah banyak dilakukan, di mana dilihat dalam terminologi waktu penelitian. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Nathalie Mobini-Kesheh dalam tesis doktoralnya di *Cornell University* yang memaparkan awal mula terbentuknya diaspora Arab Hadhrami di Indonesia. Organisasi yang menonjol dalam proses kebangkitan ini adalah Al-Irsyad yang diartikan secara harfiah sebagai organisasi masyarakat Arab untuk reformasi dan hidayah. Surkati dan beberapa tokoh non-sayyid yang tergabung dalam Al-Irsyad menolak keras adanya stratifikasi sosial di antara keturunan Hadhrami di Hindia Belanda. Penolakan inilah yang kemudian mewarnai perjalanan sejarah komunitas Hadhrami di Indonesia (atau Hindia Belanda pada masa itu).

Penelitian kedua adalah penelitian yang dilakukan terhadap kondisi orang Hadhrami setelah masa kemerdekaan yaitu oleh Martin Slama (*University of Vienna*) yang berjudul *Indonesian Hadhramis and the Hadhramaut: An Old Diaspora and its New Connections* (Slama, 2005). Dalam penelitiannya, Martin Slama berusaha menjelaskan bagaimana hubungan-hubungan diantara komunitas Hadhrami di Indonesia dan bagaimana mereka melihat atau memperlakukan tanah Hadhramaut sebagai tempat asal nenek moyang mereka. Selama juga menemukan dan menekankan kondisi komunitas Hadhrami di Indonesia yang terbelah kedalam dua kelompok besar yakni Alawiyin

yang mengklaim sebagai keturunan langsung Nabi Muhammad, sehingga memiliki kedudukan tertinggi dalam komunitasnya. Temuan Slama menunjukkan bahwa diantara dua kelompok tersebut memiliki perbedaan cara pandang dalam melihat konstruksi identitas mereka dan 'bayangan' tentang Hadhramaut sebagai tanah asal nenek moyang mereka. Menurut Slama kaum Alawiyin masih menganggap Hadhramaut sebagai tanah leluhur yang 'kadang-kadang' masih dirindukan, sebaliknya kaum Irsyadi telah menghapus memori tentang Hadhramaut dan menganggapnya sebagai bagian dari masa lalu.

Berikutnya, kajian yang dilakukan oleh Fitri Ramdhani Harahap (2014) dengan judul *Politik Identitas Berbasis Agama yang mengemukakan bahwa kemajemukan identitas di Indonesia terancam dengan adanya politik identitas yang mengarah pada penghancuran integritas kehidupan beragama yang telah lama dipertahankan. Hal ini juga semakin diperkeruh dengan dinamika politik Indonesia yang cenderung menggunakan isu-isu agama untuk mempertahankan kekuasaan politik dan cenderung menimbulkan konflik-konflik sosial keagamaan. Studi terdahulu yang digunakan untuk pengembangan kajian pustaka dalam penelitian ini adalah artikel yang ditulis oleh Stuart Hall. Berdasarkan tulisan tersebut, dapat dikatakan bahwa ketika identitas diformulasikan sebagai sesuatu yang membuat seseorang memiliki berbagai persamaan dengan orang lain, maka pada saat yang bersamaan juga identitas memformulasikan otherness.*

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan teori diaspora dan politik identitas dalam melandasi pemikiran yang ada dalam penelitian tentang diaspora Arab Hadhrami di Indonesia ini. Oleh karena itu sebagai aspek dasar dari self identity dan subject diasporic yang selalu memiliki kesadaran akan adanya perbedaan. Diaspora dimaknai sebagai sebuah perpindahan yang

membawa implikasi pada negara host dimana diteliti tentang bagaimana implikasi kedatangan Arab Hadhrami ke Indonesia. Dalam konsep diaspora, suatu kelompok masyarakat pembentuk diaspora masih melaksanakan kebudayaan asli mereka dan with varying degree masih memiliki ikatan batin yang kuat dengan wilayah asli mereka. Hubungan sosial yang terjadi antara keduanya melalui bentuk seperti perkawinan dan kebudayaan yang terkonsep dalam perubahan perilaku sosial seperti masyarakat Betawi (Rafli Rheznandya Ardiza, 2021).

Penulis melihat kehadiran diaspora keturunan Arab Hadhrami memiliki dampak yang signifikan terhadap meningkatnya politik identitas berbasis agama. Sedangkan politik identitas, dimana Cressida Heyes (2007) mendefinisikan politik identitas sebagai penandaan aktivitas politis dalam pengertian yang lebih luas dan teorisasi terhadap ditemukannya pengalaman ketidakadilan yang dialami oleh anggota-anggota dari kelompok sosial tertentu. Kemunculan politik identitas dalam dinamika politik yang sangat beragam di Indonesia tidak terlepas dari adanya rasa ketidakadilan dan persamaan hak yang diklaim oleh masing-masing kelompok atau golongan sosial tertentu. Selain itu, perbedaan yang menjadi tolak ukur utama dari keberagaman yang ada di Indonesia menjadikan politik identitas di Indonesia semakin mempertegas perbedaan tersebut.

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini mengadopsi metode penelitian analisis dokumen dengan tujuan untuk mendeskripsikan eksistensi diaspora Arab Hadhrami dalam konteks momentum pemilihan gubernur Jakarta periode 2017-2022, serta untuk mengidentifikasi perkembangan politik identitas dan kaitannya dengan keberadaan diaspora Arab Hadhrami. Metodologi yang digunakan oleh penulis adalah metode penelitian sejarah,

yang terdiri dari beberapa tahapan, yaitu heuristik, kritik, interpretasi, penjelasan, dan historiografi. Metode penelitian sejarah adalah sebuah pendekatan yang digunakan sebagai panduan dalam menginvestigasi peristiwa-peristiwa sejarah serta isu-isu yang berkaitan dengan masa lalu. Dengan kata lain, metode penelitian sejarah adalah instrumen untuk merekonstruksi peristiwa sejarah (sejarah sebagai aktualitas masa lalu) ke dalam sejarah sebagai cerita (sejarah sebagaimana ditulus. Dalam ilmu sejarah metode seperti ini disebut metode historis (Kuntowijoyo & Cet III, 1999).

Dengan metode ini, peneliti dapat merekonstruksi peristiwa-peristiwa sejarah menjadi sebuah narasi yang dapat dipahami (sejarah sebagai cerita) dari catatan-catatan yang ada. Fokus penelitian ini terbatas pada eksistensi diaspora Arab Hadhrami dalam meningkatnya politik identitas berbasis agama selama Pemilihan Gubernur Jakarta periode 2017. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik pengumpulan data sekunder, termasuk studi pustaka dan dokumen. Selain itu, data juga diperoleh dari sumber primer, seperti hasil korespondensi dengan Menara Center, sebuah pusat riset yang berkaitan dengan diaspora Arab Hadhrami di Indonesia. Data Sekunder (*Secondary data*) merupakan data yang diperoleh/dikumpulkan dan disatukan oleh studi-studi sebelumnya atau yang diterbitkan oleh berbagai instansi lain. Biasanya sumber tidak langsung berupa data dokumentasi dan arsip-arsip resmi (Syafrizal Helmi Situmorang, Muslich Lufti, 2014).

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **1. Peran Arab Hadhrami Pra Reformasi**

Tujuan utama diaspora yang dilakukan oleh para Arab Hadhrami adalah untuk dakwah dan melakukan perdagangan. Sejak lama jauh sebelum orang-orang Arab (Hadhrami) bermigrasi ke nusantara, mereka sudah dikenal sebagai pedagang dan pelaut, mirip dengan bangsa Phoenicia Kuno

(sekarang disebut sebagai bangsa Lebanon dan Suriah). Sejak kedatangannya ke Nusantara, pada abad ke-17 sampai ke-18 Arab Hadhrami telah turut memainkan peranan dalam politik Nusantara dan menguatnya pembaharuan sufisme di Nusantara.

Kedatangan bangsa Arab ini terkait erat terhadap perkembangan penyebaran agama Islam yang kemudian berasilimilasi melalui pernikahan dengan puteri bangsawan di Nusantara. Oleh karena itu, banyak raja di tanah Melayu yang berasal dari bangsa Arab seperti Kesultanan Siak Inderapura dengan penerus Sultan Syarif Kasim II (1893-1968) yang telah mendukung perjuangan Kemerdekaan Indonesia dan dengan sukarela memberikan kekuasaan monarkinya demi memilih menjadi penasihat Presiden Ir. Soekarno. Kemudian pada abad ke-20 menjadi masa yang paling menentukan bagi Arab Hadhrami, di mana gejala perubahan penting dan arah baru masyarakat terjadi.

Namun, diaspora Arab Hadhrami kemudian mengalami titik terang yang kemudian menjadi salah satu tombak yang digunakan oleh beberapa tokoh politik dalam negeri. Sebelum Indonesia merdeka, persisnya pada 4 Oktober 1934 di Semarang, lima tahun setelah Sumpah Pemuda 1928, secara alamiah penduduk yang ada di Indonesia menjadi pribumi seutuhnya, sejumlah kaum muda keturunan Arab berkomitmen untuk mendukung gagasan tanah air Indonesia dan tidak lagi mengaitkan dengan asal-usulnya Hadramaut, Yaman.

Salah satu pemuda Arab yakni A.R. Baswedan menggagas langkah awal revolusioner untuk meleburkan diri dalam cita-cita bangsa Indonesia bersama kaum Peranakan Arab di Hindia Belanda merupakan titik klimaks pencarian identitasnya untuk bersumpah bertanah air Indonesia ditengah bangsa ini masih kuat dalam cengkraman kuku penjajah.

Pada awal masa pergerakan Nasional Indonesia, perkumpulan Jamiatul Kher sebagai sebuah organisasi modern pertama yang didirikan oleh orang-orang Arab. Organisasi tersebut dapat dikatakan sebagai sumber inspirasi dan jendela informasi dari dunia luar yang mempengaruhi pola berfikir kaum intelektual Muslim Indonesia untuk bangkit dan memiliki kesadaran berjuang melepas diri dari genggamannya kolonialisme. Salah satu contoh adalah lahirnya Syarekat Islam yang kelak dimotori oleh HOS Tjokroaminoto sebagai Guru Bangsa, Guru Politik, serta bapak mertua Bung Karno, memiliki gagasan perjuangannya bersama tokoh pergerakan Islam lain dipengaruhi oleh gagasan perjuangan Jamiatul Kher yang resmi berdiri pada tahun 1991.

Pada tahun 1911, Syaikh Ahmad Surkati datang ke Indonesia sebagai pengajar dan penilik pada perguruan Jamiatul Kher yang kemudian menjadi tokoh sentral organisasi Al-Irsyad Al-Islamiyyah yang didirikan di Jakarta, 6 September 1914. Kader-kader tersebut adalah perkumpulan Jong Islamieten Bond (JIB) yang melahirkan para pemimpin bangsa seperti Dr. Mohammad Nasir, tokoh pencetus Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) melalui mosi integralnya, Mr. Mohammad Roem yang terkenal dengan ketokohnya dalam perundingan Indonesia-Belanda (Roem-Roijen), Mr. Kasman Singodimejo, Sjamsurijal, dan AM Sangadji.

Peran Peranakan Hadhrami sebenarnya telah terlihat sejak perjuangan kemerdekaan Indonesia, di mana Sultan Syarif Kasim II yang berasal dari Kesultanan Siak menyatakan dirinya adalah bagian dari Wilayah NKRI dan menyumbangkan harta kekayaannya berupa uang 13 Juta Gulden atau 1000 Triliun untuk modal Indonesia merdeka. Selain itu, Syarif Kasim juga bersama dengan Sultan Deli Serdang berusaha untuk mengajak raja-raja di Sumatera Timur untuk turut memihak dan bergabung dengan Republik Indonesia. Pada

catatan sejarah, penerus Kesultanan Pontianak, Sultan Hamid II yang di dalam tubuhnya mengalir darah Arab-Indonesia dengan nama lahir Syarif Abdul Hamid Alkadrie juga menjadi perancang Lambang Negara Indonesia Garuda Pancasila.

Tidak hanya sampai pada tokoh Arab Hadhrami yang berpengaruh dalam perpolitikan Indonesia, pengaruh Arab juga memberikan khazanah pada istilah-istilah politik sebagai sistem kekuasaan dan pemerintahan yang tetap digunakan dan resmi dipakai pada masa modern saat ini yakni Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Selain itu, diketahui bahwa terdapat lebih dari 3.000 kosa kata Bahasa Arab yang telah memberikan serapan dalam Bahasa melayu yang kini diadopsi sebagai Bahasa Indonesia.

Ridwan Saidi Syaikh Ahmad Surkati oleh Birsy Affandi dalam disertasi Syaikh Ahmad Surkati (1874-1945): Pembaharu dan Pemurni Islam di Indonesia (1999) dilabeli sebagai guru kaum reformis, Syaikh Ahmad Surkati merupakan pembuka jalan jaringan Indonesia dengan dunia Arab. Diplomat yang berhasil meyakinkan dukungan finansial negara Arab di Timur Tengah atas kemerdekaan Indonesia adalah A.R Baswedan yang telah ditetapkan sebagai pahlawan nasional oleh Pemerintah Indonesia.

Pada era pasca kemerdekaan, pergerakan Islam melalui peran Arab Hadhrami menjadi salah satu faktor domestik yang krusial, meskipun sejarah telah mencatat adanya kemunculan kecurigaan atas organisasi Islam di Indonesia pada tahun 1950an karena jejak kelam DI/TII (Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia). Upaya antisipasi atas kembalinya gerakan radikal telah sebagaimana dilakukan oleh Kartosuwiryo dan kelompoknya, membuat rezim orde baru lebih selektif untuk membatasi berbagai aktivitas yang dianggap 'mencurigakan'. Oleh karena itu, kelompok politik Islam

mencoba untuk menyesuaikan diri dengan kebijakan pemerintah.

Sejak rezim Orde Baru berlaku, suara umat Islam terbagi atau terbelah menjadi beberapa bagian, seperti PPP, GOLKAR, dan PDIP. Menurut Conor dan Vickers dalam buku *Hadhrami Arabs in Present-Day Indonesia* (Jacobsen, 2009), terdapat salah satu ciri yang paling menonjol pada era orde baru yakni demokratisasi pembunuhan. Menjelang berakhirnya masa Orde Baru, Mantan Presiden Soeharto menunjukkan hubungan yang lebih erat dengan Islam melalui Wakil Presiden Habibie. Oleh karena itu, setelah berakhirnya masa Orde Baru menjadi titik awal atau pemantik dalam munculnya organisasi politik berbasis agama. Salah satu yang paling terkenal adalah FPI (Front Pembela Islam).

## **2. Peran Arab Hadhrami Pasca Reformasi**

Pendirian FPI diinisiasi dari dua keturunan sayyid dari kelompok diaspora Hadhrami yang menyandang gelar habib, bernama Fathonis dan Adrus Jamalaha dengan ketua Muhammad Rizieq bin Husein Syihab. Beberapa keturunan sayyid juga memiliki kontribusi penting dalam pembentukan FPI seperti Husein Al-Habsyi, Ali Baaqil, Habib Muchsin Bin Zaid Al-Athos, Ali bin Abdurrahman Assegaf, Ahmad bin Novel bin Jindan, Salim Alatas, dan Abdur Rasyid bin Abdullah Syafi'I (Facal, 2020). Organisasi Front Pembela Islam (FPI) dengan ketua Habib Rizieq telah memberikan warna baru dalam arus gerakan Islam Indonesia.

Oleh karena itu, dengan kelahiran FPI mampu menyatukan berbagai elemen organisasi Islam Indonesia, serta memperlihatkan ruhul jihad Islam yang progresif revolusioner terhadap perubahan. Gerakan dakwah amar ma'ruf nahyi munkar yang dilakukan oleh FPI tentunya sesuai dengan tahapan-tahapan yang sudah dilalui

dengan mengikuti 1-Qur'an dan Sunnah. Gerakan FPI menjalankan dakwah maruf nahyi munkar dan jihad fi sabilillah, FPI juga melakukan gerakan sosial Islam dengan membantu masyarakat yang terkena musibah longsor, gempa, banjir, dan tsunami. Pada akhirnya, keberadaan gerakan FPI mudah diterima oleh masyarakat Islam Indonesia.

Perjuangan gerakan Amar Ma'ruf Nahyi Munkar seorang Imam Besar Habib Rizieq bersama dengan FPI merupakan bentuk Jihad Fi Sabilillah. FPI dapat dikatakan sebagai suatu alat gerakan untuk menegakkan perjuangan Politik Islam dalam kebebasan demokrasi. Hakikat manusia sebagai makhluk sosial yang berpolitik, dimana alat perjuangan politik Islam merupakan partai politik atau organisasi masyarakat Islam. Pada abad ke 21, di mana merupakan era demokrasi liberal yang di dalamnya terdapat kebebasan terbuka lebar bagi siapapun untuk melakukan usaha kebaikan dan perbaikan.

Maka, Imam Besar Habib Rizieq Syihab bersama FPI adalah tokoh yang melakukan gerakan amar ma'ruf nahyi munkar untuk memperbaiki keadaan umat manusia dengan memerintahkan kebaikan dan mencegah berbagai keburukan atau kejahatan. Gerakan Imam Besar Habib Rizieq bersama FPI diawali dari tahapan yang sesuai dengan koridor yang ada dalam Republik Indonesia, yakni dengan cara-cara halus dan lembut melalui surat menyurat dari tahapan tingkatan bawah sampai atas.

Mantan Presiden Abdurrahman Wahid berusaha untuk memperbaiki kembali kondisi yang ada dengan cara melakukan pendemokrasian sistem politik yang ada di Indonesia dengan menjadikan serangkaian kegagalan yang terjadi di Indonesia pada tahun 1999 sebagai pelajaran. Reformasi politik yang dilakukan oleh Abdurrahman Wahid menghasilkan buah yang baik yakni kebebasan rakyat dapat terbentuk, kedaulatan rakyat dapat ditegakkan, dan pengawasan

terhadap lembaga eksekutif dapat dilakukan oleh lembaga wakil rakyat

Kemudian pada abad ke 21, tantangan dunia Islam yang paling berat adalah politik demokrasi liberal dan ekonomi kapitalisme pemodal yang memiliki pengaruh besar terhadap kebijakan dunia Islam. Pada ingatan kita semua, sadar maupun tidak sadar bahwa agama akan selalu diawasi oleh kaum pemodal (Kapitalis), karena agama dianggap dapat memerankan peranan penting bagi arus perubahan dunia, baik di Indonesia maupun di negara lain. Salah satu yang menarik dan berkaitan dengan topik penelitian ini adalah bagaimana adanya pengawasan yang ketat terhadap presiden dan adanya jaminan yang kuat pada hak asasi manusia.

Pemilihan presiden pertama secara langsung dilakukan pada tahun 2004 setelah diadakannya pemilihan umum untuk lembaga legislatif. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa demokrasi cukup berhasil dalam membentuk pemerintahan Indonesia melalui pengaplikasian nilai-nilai demokrasi yakni pelaksanaan peraturan perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam UUD 1945. Namun dengan adanya perubahan-perubahan diatas demokrasi di Indonesia telah memiliki dasar yang kuat untuk berkembang. Gus Dur yang pernah memimpin organisasi Islam terbesar di Indonesia yaitu Nahdlatul Ulama (NU), secara terbuka mendukung peningkatan hak untuk agama dan etnis minoritas dalam demokrasi Indonesia.

Namun, anggota The Hadhrami Healing Group secara vokal mengekspresikan ketidakpercayaannya kepada Gus Dur. Ketidakpercayaan tersebut juga dipupuk oleh fakta bahwa Gus Dur ingin memperkuat Regional Commercial dengan Israel disamping Amerika Serikat dan Eropa. Pada saat itu, Megawati melakukan perjalanan ke Eropa Timur dan Rusia dengan harapan bahwa Rusia dapat mengimbangi tekanan Amerika Serikat terhadap aksi-aksi terorisme

di Indonesia. Sehingga dalam waktu yang singkat dapat menangkap seorang pemimpin Hadhrami dari kelompok militan Indonesia Laskar Jihad, salah satunya adalah Bom Bali yang dilancarkan pada 12 Oktober 2002.

Pada rezim Presiden Susilo Bambang Yudhoyono yang memiliki penekanan kebijakannya pada Muslim World dan memperluas lingkaran konsentrasinya demi meningkatkan eksistensi Indonesia pada kontestasi global. Agenda politik luar negeri yang dihasilkan oleh Marty Natalegawa mendorong Indonesia tetap berkontribusi aktif dalam perdamaian dunia, menjadi mediator konflik, dan perbaikan kesejahteraan demi menjaga stabilitas kawasan. Indonesia sebagai representasi Islam moderat yang kompatibel dengan gelombang demokrasi dunia.

Dibalik kesuksesan rezim SBY terdapat kontribusi dari Arab Hadhrami, salah satunya adalah Alwi Shihab yang menjadi penasihat Presiden Indonesia dan khususnya untuk Timur Tengah dan OKI sejak tahun 2006. Pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo, pergerakan dari kelompok Arab Hadhrami di Indonesia dapat dikatakan cukup masif bahkan aktif. perbedaan dua kubu politik yang memiliki backup masing-masing aktor dan pergerakan organisasi sosial masyarakat semakin membuat kontestasi politik menjadi semakin memanas.

Sejak Jokowi dilantik menjadi presiden pada 20 Oktober 2014, kelompok islamis tidak bisa melepaskan diri dari dua hal yaitu, ketokohan Prabowo Subianto dan isu-isu tentang pribadi dan pendukung Jokowi. Prabowo berkoalisi dengan PDIP sebagai partai sekuler yang spektrumnya paling jauh dari kelompok islamis, baik di momen Pilpres 2009 maupun Pilkada DKI 2012. Namun, tanpa kemandirian membaca gejala, kelompok islamis akan terus bergantung pada kekuatan politik termasuk mereka yang sekuler. Dalam hal ini populisme Islam harus dipulihkan dengan cara yang progresif.

Kembalinya Rizieq merupakan upaya untuk memberi energi pada politik Islam dari nasib buruk. Para eksekutif di Majelis Ulama Indonesia (MUI), sebuah lembaga keislaman negara yang dikenal dengan sikap konservatifnya, percaya bahwa Rizieq akan menjadi senjata politik yang ampuh bagi kaum islamis untuk menantang situasi saat ini. Anwar Abbas sebagai tokoh eksekutif MUI, berpendapat bahwa Habib Rizieq merupakan tokoh yang fenomenal dengan jumlah pengikut setia yang besar, juga dengan keterampilan yang tidak tertandingi dalam memberikan jabatan politik terhadap pembentukan di negara ini.

Koalisi Selamatkan Indonesia (KAMI), sebuah organisasi massa yang cukup besar yang terdiri dari banyak kritikus pemerintah terkemuka termasuk Islamis, mengklaim bahwa mereka siap untuk bekerja sama dengan Rizieq “membela keadilan, kebenaran, dan melawan penindasan”. Partai Masyumi juga meminta Rizieq untuk bergabung dengan mereka, mengingat kesamaan aspirasi politik dan ideologis mereka, juga sambutan hangat yang menunjukkan bahwa kaum Islamis berharap dengan kembalinya dia.

Namun politisi Islam lain, termasuk dari partai politik yang lebih mapan, seperti Partai Keadilan Sejahtera (PKS), hanya menyambut Rizieq dengan hati-hati. Para politisi ini memahami bahwa pengaruhnya telah tumbuh setelah insiden penistaan agama Ahok pada tahun 2017, meskipun mereka tampak mendukung kepulangannya, para politisi Islam tetap menjaga jarak dengan “ulama penghasut” tersebut. Seorang pengurus Partai Ummat menyatakan bahwa pihaknya memutuskan untuk meluncurkan logo partai sebagai pengganti kedatangan Rizieq di Indonesia karena melambangkan “perjuangan kiai dalam memerangi kekuatan opresif dan menegakkan keadilan”.

Senada dengan itu, Presiden PKS Ahmad Syaikh mendesak pemerintah tidak

mengkriminalisasi Rizieq. Ahmad Syaikh memahami bahwa ada resiko dalam membangun aliansi politik formal dengan Rizieq atau menggabungkan organisasi mereka dengan organisasi Rizieq (FPI).

Gaya Rizieq yang agresif, memecah belah, dan tanpa kompromi dapat menjadi beban bagi mereka. Rizieq bergaul dengan partai-partai Islam yang sudah mapan, membantu memperluas basis politik mereka, tetapi kehadirannya secara tidak sengaja dapat mengasingkan konstituen yang ada. Salah satunya adalah Tsamara Amany Alatas sebagai aktivis politik online dari Partai Solidaritas Indonesia, dengan menggunakan kemahirannya dalam menulis artikel tentang Presiden Joko Widodo, Gubernur Jakarta Basuki Ahok Tjahaja Purnama dan isu-isu politik di Indonesia hingga menulis buku berbau politik kontemporer di Indonesia. selain itu Tsamara juga mendorong atensi pemuda pada era digital dalam mendorong pembangunan yang lebih besar di Indonesia melalui berbagai platform. Najwa seolah-olah memberikan wajah baru Hadhrami Indonesia yang lebih moderat, sopan, dan terpelajar melalui acara Mata Najwa ataupun berbagai talkshow dengan keterlibatannya.

### **3. Identifikasi Politik Identitas Arab Hadhrami**

Konsep identitas merupakan struktur keanggotaan individu dalam kelompok seperti ciri, kategori, dan peranan sosial. Terdapat identitas menurut Hogg dan Abrams (1988) merupakan konsep masyarakat tentang siap dan seperti apa mereka, serta bagaimana mereka berhubungan dengan orang lain. Lebih lanjut, identitas politik (*political identity*) secara konseptual berbeda dengan politik identitas (*politics of identity*) merupakan konstruksi yang menentukan posisi kepentingan subjek di dalam ikatan suatu komunitas politik, sedangkan pengertian politik identitas mengacu pada mekanisme politik

pengorganisasian identitas (baik identitas politik maupun identitas sosial) sebagai sumberdaya sarana politik. Keragaman identitas Indonesia yang tertuang dalam berbagai kelompok sosial multikultural hingga kelompok diaspora merupakan tantangan bagi para pembuat kebijakan untuk mendamaikan nilai kelompok etnis diaspora dengan nilai-nilai Pancasila.

Politik identitas mengarah pada suatu kegiatan politik yang jalan politiknya sangat berkaitan dengan identitas-identitas yang dibawa oleh masing-masing etnis. Menurut Wingmore-Shapherd (2012) menyatakan bahwa permasalahan ini muncul ketika dalam sebuah negara multietnis, setiap etnisnya memiliki aspirasi dan kepentingan yang berbeda. Hal ini dapat mengarah pada *ethno-political congruence*, yakni sebuah posisi politik hanya ditujukan pada suatu kelompok identitas etnis. Mobilitas identitas etnis menjadi identitas politik yang dilakukan untuk mencapai sebuah kepentingan dari kelompok etnisnya dalam suatu negara.

Sebuah etnis yang dominan akan dapat mendominasi di segala aspek termasuk ranah politik kebijakan yang cenderung akan berpihak pada etnisnya, atau dapat menjadi potensi diskriminatif terhadap etnis lainnya. Bukan hanya politisasi identitas etnis yang berpotensi terjadi tetapi juga bagaimana isu politik sendiri dapat menjadi isu yang mengarah pada isu suatu etnis. Segala kebijakan yang menyangkut dengan etnis dapat diangkat ke ranah politik yang akan berpotensi menimbulkan disparatis dalam masyarakat dan sangat memungkinkan untuk terjadinya konflik antar etnis.

Apabila dikaji menggunakan teori yang dijelaskan oleh Arcan dalam jurnalnya, kelompok Arab Hadhrami dapat dikelompokkan kedalam identitas instrumental yang mana pergerakan diaspora Arab Hadhrami di Indonesia cenderung situasional, tergantung pada era pemerintahan siapa dan permasalahan sosial serta status quo apa yang tengah

terjadi di masyarakat. Kemudian berlanjut pada era pasca era reformasi yang sempat terjadi beberapa kali pasang surut performa etnis Arab Hadhrami di Indonesia. Hal tersebut dapat terjadi akibat timbul banyak gerakan Islam lainnya yang kemudian beberapa diantaranya memiliki nilai atau paham yang berbeda dengan pemerintahan yang berkuasa.

#### **4. Peran Politik Identitas dalam Dinamika Politik Indonesia**

Untuk pertama kalinya di Indonesia, dinamika warga keturunan Arab di Indonesia dibahas secara ilmiah dalam seminar Internasional, namun juga terdapat kritikan tajam terhadap sejumlah tokohnya yang dianggap tidak mampu menjaga warisan leluhurnya. Dalam seminar internasional tersebut, peranakan Arab Hadhrami diingatkan untuk kembali berdakwah dengan cara yang tidak memecah belah kehidupan umat beragama. Hal itu tidak terlepas dari gaya kepemimpinan Habib Rizieq yang dianggap gemar memecah belah dan memiliki gaya kepemimpinan yang keras.

Politik identitas mengalami penguatan dan beririsan dengan gerakan populisme Islam yang sepak terjang Habib Rizieq akhirnya menjadi sorotan utama setelah keterlibatannya yang mencolok selama Pilkada Jakarta, pernyataan tersebut dikatakan oleh Azyumardi Azra dalam seminar tersebut. Pernyataan Azyumardi tersebut merujuk pada gelombang unjuk rasa yang melibatkan ratusan ribu orang selama Pilkada Jakarta yang menggunakan isu agama. Hal tersebut disebabkan karena diyakini oleh khalayak banyak bahwa Rizieq merupakan keturunan satu-satunya panutan Islam yakni Nabi Muhammad SAW. Meskipun demikian, tidak berarti sikap dan tindakan Front Pembela Islam (FPI) ini mewakili aspirasi orang-orang keturunan Arab di Indonesia, karena banyak juga

diantara mereka yang aktif dan meyakini Nahdlatul Ulama (NU).

Perlu diketahui bahwa masyarakat Arab di Indonesia seperti masyarakat pada umumnya, yakni tidak berlabuh dalam satu aliran politik atau keagamaan yang tunggal. Dalam seminar internasional tersebut ia menegaskan bahwa Hadhrami di Indonesia terdiri dari beberapa aliran di mana mereka ada yang menganut tarekat Baalawi seperti yang dianut oleh nenek moyang mereka, tetapi juga ada yang terpengaruh oleh aliran-aliran lain dalam Islam, atau juga aliran liberalisme dan sosialisme.

Oleh karena itu, ketika muncul sosok peranakan Arab yang sangat menonjol selama Pilkada Jakarta yang diwarnai mobilisasi massa dengan menggunakan isu agama dan etnis, Farid menganggapnya itu tidak mewakili kepentingan orang-orang Arab secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa itu bukan gambaran umum orang Arab di Indonesia, artinya apa yang menjadi pemikiran dan tindakan Rizieq tidak dapat dianggap mewakili aspirasi seluruh keturunan Arab di Indonesia.

Sebagai seorang keturunan Arab, Farid Alatas tidak setuju dengan penggunaan sentiment agama dan etnis seperti yang terjadi dalam Pilkada Jakarta lalu, yang di mana diketahui bahwa sasaran mobilisasi massa adalah Gubernur Jakarta terdahulu, Basuki Tjahaja Purnama yang merupakan keturunan Tionghoa atau China. Farid Alatas merasa bahwa sikap tersebut merupakan suatu kemunduran, karena tradisi Hadhrami di Indonesia tidak pernah mempolitisasi soal etnis.

#### **5. Diaspora Arab Hadhrami dalam Dinamika Politik Pemilihan Gubernur Jakarta Tahun 2017**

Pilkada dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Namun,

dalam pelaksanaan Pilkada seringkali diwarnai oleh konflik antar kelompok yang seringkali terkait dengan isu kelompok, suku, agama, ras, dan jenis kelamin dari pasangan calon Kepala Daerah. Konflik dalam Pilkada sering kali terjadi, namun yang paling fenomenal dan menyedot perhatian masyarakat Indonesia adalah Pilkada DKI Jakarta tahun 2017. Dalam kunjungannya tersebut, Ahok memberikan sambutan di hadapan warga dengan menyebutkan Surat Al-Maidah Ayat 51 yang memancing reaksi pro dan kontra dari publik. Sebagian besar umat Islam marah karena merasa Surat Al-Maidah telah dinistakan oleh Ahok dalam pidato tersebut.

Pembentukan politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta 2017 tersebut disebabkan oleh beberapa faktor yakni terdapat salah satu pasangan calon yang berasal dari dua minoritas yakni China (Tionghoa) dan Kristen. Selain itu, pidato Ahok di Pulau Pramuka Kepulauan Seribu yang menyinggung Surat Al-Maidah Ayat 51 yang memicu reaksi pro kontra dalam masyarakat. Kemudian media sosial berperan besar dalam proses pembentukan politik identitas masyarakat Muslim di Jakarta, terutama ketika Buni Yani mengunggah video pidato Ahok di Kepulauan Seribu yang menjadi viral dan memancing kemarahan sebagai besar umat Islam.

## KESIMPULAN

Diaspora Arab Hadhrami sebagai komunitas diaspora yang ada di Indonesia masih eksis terlihat baik dalam aspek budaya, ekonomi, dan politik. Menurut sejarawan, Kaum Arab Hadhrami telah datang di Indonesia sejak abad ke-17. Para Arab Hadhrami datang ke Nusantara pada abad ke-17 dengan tujuan berdagang dan menyebarkan agama Islam yang kemudian berasimilasi dengan menikahi para puteri bangsawan di Nusantara. Pada masa memperjuangkan kemerdekaan Indonesia, banyak tokoh Arab

yang mendedikasikan dirinya untuk memperjuangkan kemerdekaan Indonesia. Salah satu tokoh Arab Hadhrami adalah yang berasal Kesultanan Siak, Sultan Syarif Kasim II yang mendedikasikan dirinya sebagai penasihat Ir. Soekarno. Selain itu, terdapat pula Sultan Hamid II, A.R. Baswedan, dan lain sebagainya.

Namun pada masa orde baru, pemerintah Indonesia lebih sensitif pada kelompok diaspora Arab Hadhrami. Kemudian hubungan dengan komunitas Arab Hadhrami dipererat kembali oleh Presiden B.J. Habibie. Pada masa setelah reformasi perpolitikan Indonesia kembali diisi oleh Peranakan Arab seperti Farid Alatas, Anies Baswedan, Rizieq Shihab, Yusuf Martak, Alwi Shihab, Najwa Shihab, dan lain sebagainya. Namun, pada tahun 2017, perpolitikan Indonesia diguncangkan oleh peristiwa Basuki Tjahaja Purnama atau akrab dipanggil Ahok pada waktu itu melakukan kunjungan ke Pulau Seribu pada 30 September 2016. Dalam kunjungannya tersebut, Ahok memberikan sambutan di hadapan warga dengan menyebutkan Surat Al-Maidah Ayat 51 yang memancing reaksi pro dan kontra dari publik. Sebagian besar umat Islam marah karena merasa Surat Al-Maidah telah dinistakan oleh Ahok dalam pidato tersebut. Singkatnya, reaksi masyarakat terhadap Ahok menuai gerakan 212 yang dipimpin oleh Habieb Rizieq yang menjadi gerakan Islam paling besar pada tahun 2017.

## DAFTAR PUSTAKA

- Affan, H. (2017). *Wajah Peranakan Arab di Indonesia: Rizieq Shihab, Politik Identitas, dan Pernyataan Tentang Stereotip*. BBC Indonesia. Dilansir pada 19 Oktober 2022.
- Alatas, I. F. (2015). *Gold and Silver, Branded Horses, and Well-Tilled Land: Gender and Hadhrami Migration*. *Indonesia Feminist Journal*, 3(1).

- Al-Masyhur, I.A. (2018). *Diaspora Arab Sayyid: Peran Keturunan Nabi SAW dalam Mengisi Sejarah Nusantara*. Jakarta: Saraz Publishing.
- Al-Masyhur, I. A. (2018). *Sejarah Perjalanan Salaf Habib*. Jakarta: Saraz Publishing.
- Al-Qurtuby, S. (2017). *Arabs and "Indo-Arabs" in Indonesia: Historical Dynamics, Social Relations and Contemporary Changes*. *International Journal of Asia Pacific Studies*, 13(2), 45-72.
- Amaruli, R.J. (2018). *Sumpah Pemuda Arab, 1934: Pergulatan Identitas Orang Arab-Hadhrami di Indonesia*. *Jurnal Sejarah Citra Lekha*, 3(2), 121-132.
- Ardiza. Rheznadndya. Rafli. *Diaspora Bangsa Arab Hadrami: Pengaruh Arab-Indonesia di Jakarta 1900-2000*. 2021
- Batarfie. (2021). *Diaspora Hadhrami di Nusantara dan Kontribusinya terhadap Kemerdekaan Indonesia*. Diakses pada 22 November 2022, dari <https://www.batarfie.com/2021/08/diaspora-hadhrami-di-nusantara-dan.html>.
- Citra, S.E. (2020). *Suatu Tinjauan Historis Kebangkitan Diaspora Keturunan Arab di Indonesia*. *Jurnal Syntax Transformation*, 1(5), 175-186
- Community, L. F. (2020). *Diaspora Arab di Indonesia: Siapa, Kapan, dan Bagaimana*. Diakses pada 22 November 2022, dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2020/09/11/diaspora-arab-di-indonesia-siapa-kapan-dan-bagaimana>
- Facal, G. (2020). *Islamic Defenders Front Militia (Front Pembela Islam) and Its Impact on Growing Religious Intolerance in Indonesia*. *TRaNS: Trans-Regional and National Studies of Southeast Asia Journal*, 8(1), 7-20. <https://doi.org/10.1017/trn.2018.15>.
- Harahap, F. (2014). *Politik Identitas Berbasis Agama*. Konferensi Nasional Sosiologi III. Yogyakarta
- Kusumo, R. (2022). *Hadhrami dalam Dinamika Keislaman dan Kebangsaan di Indonesia*. *Good News from Indonesia*. Dilansir pada 19 Oktober 2022, dari <https://www.goodnewsfromindonesia.id/2022/04/20/kiprah-keturunan-arab-hadhrami-dalam-dinamika-keislaman-dan-kebangsaan-di-indonesia>.
- Lestari, D. (2019). *Pilkada DKI Jakarta 2017: Dinamika Politik Identitas di Indonesia*. *Jurnal Trunojoyo*, 2(1)
- Mobini-Kesheh, N. (1997). *Islamic Modernism in Colonial Java: The Al-Irshad Movement*. In U. Freitag & W. G. Clarence-Smith (Eds.), *Hadhrami Traders, Scholars and Statesmen in the Indian Ocean, 1750s-1960s* (pp. 231–248). Leiden, The Netherlands: Brill.
- Mobini-Kesheh, N. (1999). *The Hadhrami Awakening: Community and Identity in the Netherlands East Indies, 1900-1942*. New York: Cornell Southeast Asia Program.
- Nasser, R. (2020). *Perkembangan Komunitas Arab di Indonesia: Studi Kasus Perkampungan Masyarakat Arab di Pekojan Jakarta Barat pada Tahun 1950-2018*. *Historia Madania*, 4(2), 247-268.
- Rahmatullah, M.A., & Halimah, N. (2020). *Habib Riziq Syihab, Demokrasi, dan Politik Islam*. *Jurnal Pendidikan Agama Islam Adz-Zikr*, 5(2).
- Saeputro, M.A., & Amaruli, R.J. (2021). *Mencari Identitas Reformis Islam: Konflik dan Integrasi Orang Arab Hadhrami di Pekalongan, 1905-1945*. *Jurnal Histiografi*, 2(1), 1-9.
- Saleh, W. F. (2016). *Gerakan Modern Islam di Indonesia: Dari Perkumpulan Sosial Menjadi Yayasan Pendidikan 1901-1919*. (Jam'Iyyat Khair, Ed.).

- Slama, M. (2005). *Indonesian Hadhramis and the Hadhramaut: An Old Diaspora and its New Connections*. In *4TH International Symposium Of The Journal Antropologi Indonesia, Indonesia in the Changing Global Context: Building Cooperation and Partnership?* (pp. 1–13). Universitas Indonesia. Retrieved from <https://simposiumjai.ui.ac.id/wp-content/uploads/20/2020/03/19.7.3-Martin-Slama.pdf>.
- Situmorang. Helmi. Fahrizal, Lufti. Muslich. 2014. Analisis Data Untuk Riset Manajemen dan Bisnis (3)
- Syarif, F. (2019). *Defining Arabism: The Contestation of Arab Identity in the Hadhrami Community in Betawi*. Paramita: Historical Studies Journal, 29(2), 190-203.